

## **BAB II**

### **PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI SDN TEMBALANG**

#### **2.1 Gambaran Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

##### **2.1.1 Program Makan Sekolah dalam Konteks Global**

Intervensi sumber makanan di sekolah bukanlah hal baru dalam konteks kebijakan publik, apalagi dalam arena global. Program seperti ini, bisa dibilang sudah cukup terbilang klasik sebagai salah satu model kebijakan, yang mana sudah banyak sekali negara yang mengimpletasikan dan mempertahankan program ini selama bertahun-tahun. Brasil dengan *Program Nacional de Alimentacao Escolar* (PNAE) yang dimulai sejak tahun 1950-an, Jepang dengan sistem *kyushoku* yang telah mapan selama lebih dari tujuh puluh tahun lamanya, bahkan hingga tahun 2023, angka untuk program ini secara global bisa dibilang lumayan besar yang mana program semacam ini telah berhasil menjangkau lebih dari 418 juta anak di 161 negara, dan menjadikannya salah satu bentuk dan kebijakan perlindungan sosial terbesar yang pernah ada (WFP, 2023)



**Gambar . PNAE BRAZIL**  
Sumber: Logomarca GovBR

Jika dilihat dari konteks hubungan internasional, kita bisa lihat bagaimana penekanan bahwa program makan di sekolah tidak dapat dipahami hanya sebagai intervensi gizi saja, program ini juga dilihat sebagai kebijakan yang beroperasi pada berbagai lapisan secara bersamaan. Di lapisan paling teknis, program ini berfokus pada peningkatan asupan gizi anak. Di tingkat menengah, yang berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan pemerataan akses pendidikan. Di lapisan terdalam sendiri, program ini menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai perhatian mereka terhadap kebutuhan warganya. Dalam hal ini, program makan sekolah adalah institusi sosial yang rumit, bukan sekadar urusan logistik dapur (Cupertino et al., 2022)

Hal yang menarik yang sebenarnya bisa kita lihat adalah bagaimana negara dengan kondisi aktual ekonomi berbeda mendesain dan merancang program ini, sehingga melahirkan dan menciptakan berbagai bentuk dari program dengan kompleksitas yang lumayan tinggi ini. Di negara-negara berkembang, contohnya, program ini biasanya diposisikan sebagai jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk kelompok yang ekonominya rentan sehingga menjadi “asuransi” yang membuat masyarakat dengan ekonomi yang lebih rentan tidak perlu ambil pusing jika berkait dengan konteks serupa. Sementara di negara-negara maju seperti Finlandia dan Swedia, program ini bersifat universal dan tidak memerlukan seleksi berdasarkan ekonomi. Pendekatan yang bisa dibilang cukup general inilah yang membuat program makan sekolah di negara-negara tersebut berhasil menghilangkan stigma bagi penerima bantuan dan membangun kohesi sosial yang lebih baik di lingkungan sekolah (Rassanjani & Rahmi, 2025). Konteks perbandingan ini sangat penting untuk memahami desain program MBG di Indonesia.

Proses implementasi program dengan model ini oleh Brazil melalui PNAE patut menjadi referensi. Program yang berumur lebih dari beberapa dekade ini awalnya dihadirkan di tengah masyarakat sebagai solusi dari masalah gizi yang berlangsung saat itu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, program ini bertransformasi menjadi program yang dianggap sebagai kebutuhan dan hak sosial oleh masyarakatnya. Hal yang patut digarisbawahi dalam pelaksanaan program ini adalah Brasil tidak hanya fokus pada pemberian makanan kepada anak-anak di

sekolah. Program ini terhubung secara langsung dengan peningkatan ekonomi lokal, di mana 30 persen dari anggarannya diharuskan untuk membeli bahan makanan langsung dari petani setempat. Ini adalah poin yang sangat penting untuk dijadikan refleksi dan referensi, bagaimana implementasi program “makann” yang baik terlihat. Perubahan signifikan ini tentu tidak terjadi begitu saja secara instan. PNAE terwujud seperti sekarang berkat proses panjang yang mencakup penyesuaian kebijakan, evaluasi berkali-kali, dan perbaikan sistem selama beberapa dekade (Cupertino et al. , 2022). Untuk Indonesia yang baru memulai perjalanan MBG, seharusnya bisa melihat bagaimana program seperti yang di perlihatkan melalui PNAE sebagai refleksi bahwa keberhasilan jangka panjang program serupa, tidak hanya bergantung dan bertumpu pada besarnya anggaran awal. Konsistensi, rancangan penyusunan institusi yang baik, evaluasi secara berkala, dan terus melakukan perbaikan terhadap program dari waktu ke waktu merupakan faktor utama program serupa dapat bertahan dan sustain dan diterima di masyarakat.

### **2.1.2 MBG di Indonesia**

Indonesia bisa dibilang memulai tahun 2025 dengan membawa beban yang cukup berat dalam masalah gizi anak. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting secara nasional berada di angka 19,8 persen, mengalami penurunan dari 21,5 persen pada tahun 2023. Walau penurunan ini tetap perlu diapresiasi, angka tersebut masih jauh di atas target 14,2 persen yang ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Kementerian Kesehatan RI, 2025). Di balik angka yang disebutkan barusan, ada fakta menarik yang bisa dijadikan pertimbangan tentang bagaimana rata-rata nasional menyembunyikan adanya ketimpangan yang lumayan menonjol dalam konteks strata ekonomi, di mana data SSGI 2024 menunjukkan bahwa pada kelompok masyarakat paling miskin prevalensi stunting mencapai 29,8 persen, yang mana angka ini jauh lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Di satu sisi, kelompok terkaya mencatat angka yang rendah, yaitu di bawah 10 persen (Kementerian Koordinator PMK, 2025).



**Gambar 1. MBG Di Sekolah**  
Sumber: Jawa Pos

Di luar masalah stunting, terdapat isu gizi yang lebih luas yang berdampak pada anak-anak yang sedang menempuh pendidikan dasar. Sebuah kajian oleh Pramesthi et al. (2025) tentang program ProGAS (Program Gizi Anak Sekolah) yang menjadi cikal bakal MBG mencatat bahwa banyak anak-anak yang berada pada kategori anak sekolah kebanyakan memulai hari mereka sebelum Proses Belajar Mengajar (PBM) tanpa makanan yang memadai. Dapat dilihat sebenarnya bagaimana kemiskinan tidak menjadi faktor utama yang menjadikan hal ini dapat terjadi. Hal lainnya seperti kesadaran akan urgensi gizi di pagi hari, kesibukan keluarga, dan pola makan yang sudah terbentuk sebelumnya yang tidak teratur juga turut berperan. Akibatnya, berdampak pada proses PBM anak itu sendiri, mulai dari terjadi penurunan konsentrasi belajar, stamina yang menurun selama hari sekolah, dan dalam jangka panjang berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian kognitif yang seharusnya dapat dihindari.

Berlatar belakang hal yang hampir serupa, akhirnya program MBG coba dihadirkan dan mendapat respons yang baik dari masyarakat. Ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung program makan siang gratis sebagai salah satu prioritas dalam kampanye menjelang Pemilu 2024, program tersebut tentunya tidak hadir dan naik ke permukaan sebagai pernyataan politik tanpa alasan. Masalah yang lumayan mengakar pada masyarakat Indonesia, yaitu bagaimana masih banyak anak yang tidak mendapatkan asupan gizi yang layak di antara masyarakat Indonesia. Setelah pasangan ini memenangkan pemilihan, janji

kampanye tersebut akhirnya secara resmi mulai diimplementasikan. Salah satu langkah kunci adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan program MBG (Peraturan Presiden RI No. 83 Tahun 2024). Melalui regulasi ini, BGN (Badan Gizi Nasional) diberi posisi yang cukup krusial sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam hal pemenuhan dan pemulihan isu gizi nasional. Pada akhirnya, arah gerak MBG kemudian difokuskan sebagai program utama dengan tanggung jawab yang besar, bukan sekadar janji politik, tetapi juga sebagai agenda negara untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Program MBG akhirnya secara resmi diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan tahap awal implementasinya mencakup tiga juta penerima manfaat. Target ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, hingga pada Oktober 2025, sebanyak 11.900 SPPG telah beroperasi dan melayani 35,4 juta anak serta ibu hamil setiap harinya, atau sekitar 35 persen dari target nasional sebesar 82,9 juta penerima (Presiden RI, 2025). Anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2025 mencapai Rp 71 triliun, dengan Rp 51,5 triliun di antaranya digunakan untuk pengadaan bahan makanan bagi 17,9 juta penerima manfaat, termasuk 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2025). Jumlah anggaran yang keluar untuk program ini sendiri melebihi total anggaran untuk perlindungan sosial Kementerian Sosial pada tahun sebelumnya, yang menjadikan MBG sebagai program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

### **2.1.3 Tujuan, Sasaran, dan Tata Kelola MBG**

Program MBG sebenarnya membawa beberapa tujuan sekaligus. Yang paling dasar tentu soal pemenuhan gizi. Anak usia sekolah diharapkan bisa mendapat makanan yang cukup dan seimbang setiap hari, tanpa harus bergantung pada mampu atau tidaknya keluarga mereka menyediakan itu di rumah. Namun, targetnya tidak berhenti dan terbatas sampai di sana saja. Dalam skala yang lebih besar dan lebih luas, MBG juga coba untuk diarahkan dengan tujuan menekan angka stunting, membantu anak lebih siap belajar, dan dalam jangka panjang pastinya juga ikut membentuk generasi yang lebih sehat serta lebih cerdas menuju Indonesia Emas 2045 (Sekretariat Negara RI, 2025). MBG dalam implementasinya

tidak hanya terbatas dan terfokus pada agenda pemberian makan siang saja, melainkan ada agenda pembangunan sumber daya manusia yang cukup besar di belakangnya. Menariknya lagi, perencanaan MBG juga dirancang untuk membantu dan melibatkan ekonomi lokal. Dengan melibatkan SPPG sebagai unit produksi di tingkat daerah, diharapkan bisa membuka ruang bagi UMKM, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi komunitas untuk masuk ke dalam rantai pasok pangan dan produksi MBG nantinya (Kementerian Keuangan RI, 2025). Yang mana dapat membuat posisi MBG bukan sekadar program kesejahteraan sosial biasa, melainkan penggerak dan pusat perputaran rantai ekonomi di Indonesia sendiri.

Kelompok sasaran MBG sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 mencakup peserta didik pada jenjang PAUD hingga SMA di semua jenis lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, umum maupun keagamaan. Selain itu, program ini juga menyasar balita, ibu hamil, dan ibu menyusui melalui mekanisme kerja sama dengan Posyandu. Program yang mengincar implementasi secara luas ini mengandung poin penting, yang mana program ini tidak dirancang hanya berfokus untuk rakyat miskin, melainkan program yang ditujukan untuk semua anak yang masih dalam masa pertumbuhan, tanpa sama sekali memandang status ekonomi keluarganya. Pendekatan yang menyeluruh dan inklusif inilah yang menjelaskan mengapa program ini juga hadir di kawasan seperti Tembalang yang rata-rata tingkat ekonominya tergolong menengah ke atas.

SPPG, jika dilihat dari teknis kelolanya, beroperasi dan berjalan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, mencakup standar menu, standar gramasi per jenjang pendidikan, standar kebersihan dan keamanan pangan, bahkan sampai ke jadwal distribusi. Pengawasan program ini juga dilakukan dan dipantau dari luar, yang mana dilaksanakan oleh pihak Puskesmas dengan cara memeriksa sampel makanan secara rutin, sedangkan untuk masukan dari penerima manfaat untuk evaluasi, menurut Informan, biasanya dikumpulkan melalui beberapa cara, termasuk pesan tertulis yang dimasukkan siswa ke dalam wadah makanan mereka. Sistem pemantauan yang bertingkat ini merupakan bagian penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap program, mengingat skala distribusi yang sangat luas dan langsung menyentuh kebutuhan

dasar kelompok yang paling rentan secara biologis, yaitu anak-anak yang sedang berkembang (Badan Gizi Nasional, 2025).

#### **2.1.4 Kontroversi dan Dinamika Publik Seputar MBG**

Sebagai program sosial terbesar dalam sejarah program kesejahteraan di Indonesia, MBG tidak terlepas dari perdebatan. Rahmah et al. (2025) mencatat bahwa hasil survei GoodStats menunjukkan sekitar 21 persen masyarakat setuju dengan program ini, sementara 20 persen lainnya tidak memberikan pendapat. Dari data tersebut dapat menggambarkan dan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan cara pelaksanaan program ini masih sangat minim. Di kalangan akademisi dan pengamat kebijakan, diskusi tentang MBG juga selalu berputar pada beberapa pertanyaan penting yang cenderung repetitif, seperti apakah alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun sebanding dengan manfaat yang diperoleh, apakah cara distribusi telah cukup transparan, dan apakah program ini benar-benar menangani masalah gizi yang mendasar atau hanya sekadar menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Di lapangan, ada banyak tantangan yang harus dihadapi selama keberjalanan program ini. Beberapa kejadian keracunan makanan yang dialami oleh ratusan siswa di berbagai wilayah pada pertengahan tahun 2025 menunjukkan dan menggambarkan bagaimana standar keamanan pangan belum sepenuhnya diterapkan di semua SPPG. Ini jelas bukan masalah remeh, karena seharusnya program yang ditujukan untuk anak-anak memerlukan pengawasan yang benar-benar ketat. Hal inilah yang sebenarnya membuat kita dapat melihat bagaimana kebijakan publik tidak sepenuhnya ditinjau melalui perspektif kebijakan saja. Tanpa partisipasi masyarakat, pengawasan publik, dan transparansi yang memadai, MBG dapat berubah menjadi kebijakan yang terlihat besar di luar, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang sebenarnya yang benar-benar anak-anak butuhkan, dan seharusnya menjadi fokus program ini (Kiftiyah, 2025).

Program ini, jika dilihat lagi, sebenarnya sudah mendapatkan dukungan yang cukup banyak dari mereka yang merasakan langsung manfaatnya. Para guru dan orang tua di sejumlah daerah mengapresiasi inisiatif ini, terutama dalam komunitas yang selama ini kesulitan mengakses makanan bergizi (Pora et al., 2025). Manfaat-manfaat ini biasanya berkaitan dengan kegiatan Proses Belajar

Mengajar (PBM) murid di sekolah seperti yang dilaporkan, meliputi peningkatan kehadiran siswa, pengurangan keluhan rasa lapar dan ketidakfokusan di kelas. Beragam tanggapan publik ini justru memperkuat argumen bahwa program MBG memiliki makna yang sangat kontekstual. Hal ini bervariasi tergantung pada latar belakang sosial ekonomi penerimanya, dan itulah salah satu alasan mengapa penelitian mendalam di tingkat komunitas seperti ini sangat penting.

## **2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **2.2.1 Kota Semarang**

Kota Semarang, yang biasa dikenal sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan juga berperan sekaligus sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan tinggi, industri, dan sektor jasa di bagian tengah Pulau Jawa. Secara lokasi, kota ini terletak di ujung utara Pulau Jawa dengan luas area mencapai 373,70 km persegi yang dibagi menjadi enam belas kecamatan serta 177 kelurahan. Letak strategisnya sebagai penghubung antara wilayah pantai dan pedalaman di Jawa Tengah membuat Semarang mengalami pertumbuhan yang cepat, baik dalam sektor ekonomi maupun jumlah penduduk. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 5,73 persen pada tahun 2022, naik dari 5,16 persen di tahun sebelumnya, dengan produk domestik regional bruto yang dihitung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 227,6 triliun (BPS Kota Semarang, 2023).

Terdapat dua hal ataupun dua faktor yang paling berpengaruh dalam dinamika sosial Kota Semarang, yang mana kedua faktor utama ini juga saling berhubungan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan migrasi penduduk. Sebagai kota yang menarik banyak pekerja dan mahasiswa dari berbagai daerah, Semarang memiliki kompleksitas sosial yang tidak selalu terlihat hanya dari aspek makroekonominya. Di balik pertumbuhan ekonomi yang baik, di kota ini masih terdapat wilayah dengan tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan akses terhadap layanan dasar. Ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI di Kota Semarang pada tahun 2022 mencapai 99,97 persen, yang menunjukkan bahwa jangkauan pendidikan dasar di kota ini sangat tinggi. Namun, angka tersebut tidak selalu mencerminkan kualitas pendidikan yang merata di

seluruh kawasan (BPS Kota Semarang, 2023). Dari gambaran di atas, cukup menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kekayaan kontekstual Kota Semarang dapat memengaruhi pastinya kompleksitas pemaknaan terhadap suatu kebijakan, khususnya kebijakan dengan skala nasional.

### **2.2.2 Kecamatan Tembalang**

Di antara enam belas kecamatan yang ada di Kota Semarang, Tembalang memiliki posisi yang cukup menarik. Dari segi jumlah penduduk, daerah bisa dibilang daerah yang termasuk besar. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya saja sudah mencapai sekitar 192. 000 orang, menjadikan kecamatan tembalang, kecamatan dengan populasi terbesar kedua di Semarang. Pertumbuhannya juga bisa dibilang cukup signifikan, bisa dilihat dengan laju pertumbuhan berkisar antara 1,4 hingga 1,57 persen per tahun. Untuk kepadatan penduduknya sendiri Kecamatan Tembalang telah mencapai kurang lebih 3.758 orang per kilometer persegi, angka yang menunjukkan bahwa Tembalang bukan lagi wilayah pinggiran yang memiliki ruang yang cukup lapang, dan sudah terhitung sebagai sebuah kawasan perkotaan yang padat, aktif, dan terus berkembang (BPS Kota Semarang, 2023). Dari luas wilayahnya yang mencakup 51,19 km persegi ada hal yang menarik untuk diperhatikan, yang mana sebagian besar justru terdiri dari lahan non-sawah. Hal ini menjadi masuk akal ketika melihat karakter Tembalang saat ini sebagai area perkotaan yang ruang pertaniannya semakin menyusut, sampai-sampai hampir tak lagi menjadi bagian utama dari identitas wilayah tersebut.

Adanya institusi pendidikan tinggi dalam kawasan Kecamatan Tembalang juga menjadi hal menarik dan mencolok. Universitas Diponegoro (UNDIP), yang menempati area seluas 180 hektar, terletak di pusat kawasan kecamatan ini, mencakup seluruh program sarjana dari berbagai fakultas serta pusat administrasi universitas. Selain UNDIP, ada juga enam perguruan tinggi lainnya yang beroperasi di Tembalang, sehingga totalnya menjadi tujuh perguruan tinggi. Menurut data BPS Kota Semarang 2023, sekitar 53. 641 mahasiswa aktif tinggal dan beraktivitas di Tembalang. Jumlah ini hampir sepertiga dari seluruh penduduk kecamatan, sebuah rasio yang sangat bisa dibilang sangat signifikan, menarik dan secara mendasar mengubah karakter sosial dan ekonomi area ini pastinya.

Jika dilihat dari aspek mata pencaharian, bisa dilihat bagaimana data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Tembalang, yaitu 62 persen, beroperasi di sektor jasa dan yang serupa, termasuk pengelolaan kos-kosan dan rumah makan yang menjadi pilar perekonomian di kawasan ini. Untuk pekerjaan formal seperti pegawai negeri sipil, TNI, dan POLRI menyumbang sebesar 14 persen, lalu untuk pedagang sebesar 8 persen. Dan untuk sektor pertanian hanya mencakup sekitar 2 persen, angka yang sangat kecil dan sejalan dengan karakter urban daerah ini yang hampir tidak memiliki ruang untuk kegiatan pertanian (BPS Kota Semarang, 2023). Komposisi pekerjaan ini, bersamaan dengan banyaknya perguruan tinggi dan populasi mahasiswa yang besar, membentuk citra Tembalang sebagai kawasan perkotaan menengah yang bisa dibilang relatif stabil.

Prasetyo (2012) juga mengungkapkan bahwa kehadiran kampus UNDIP telah membawa perubahan signifikan bagi Tembalang, namun pastinya, tidak semua masyarakat merasakan dampaknya dengan cara yang seragam. Mereka yang memiliki tanah atau bangunan berkesempatan untuk menikmati peningkatan permintaan akan kos-kosan dan usaha sejenis. Beberapa bagian di masyarakat bahkan menganggap perubahan tersebut menjadi sumber keuntungan yang besar. Sebaliknya, situasi ini berbeda bagi mereka yang tidak memiliki aset tersebut. Individu yang bergantung pada pekerjaan harian, usaha kecil, atau sistem upahan sering kali menghadapi tantangan baru, mulai dari tingginya biaya hidup hingga semakin ketatnya persaingan ekonomi sebagai contohnya. Berarti dapat diidentifikasi bahwa setidaknya ada dua sisi ekonomi di Tembalang. Wilayah satunya yang tampak berkembang dan semakin stabil, sedangkan di sisi lain, terdapat kelompok warga yang tidak sepenuhnya merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut.

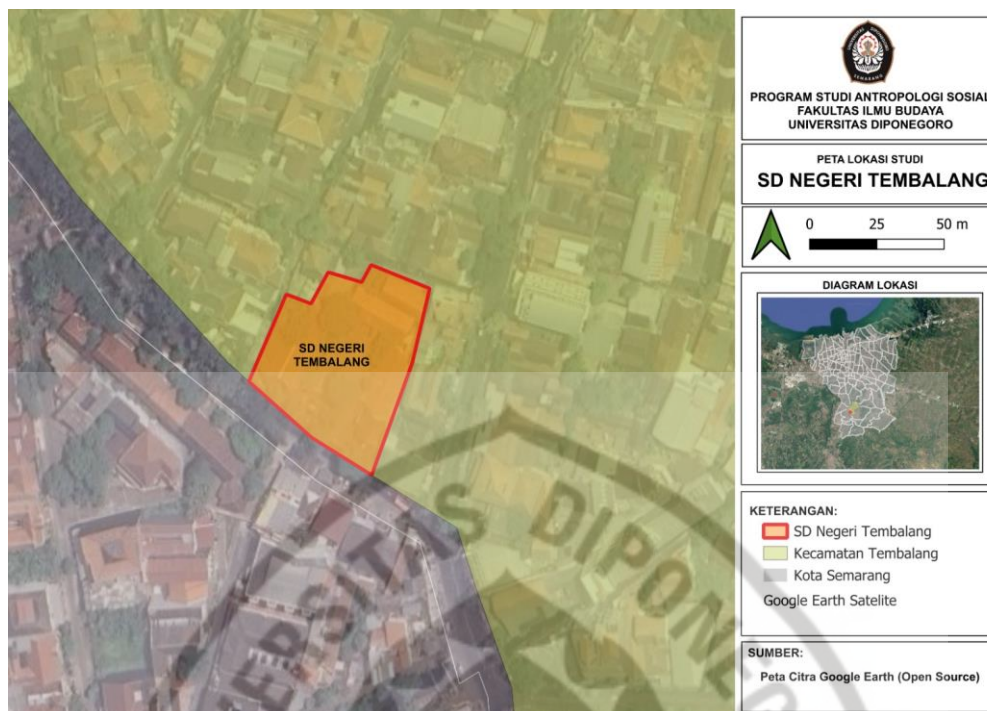
Atribut yang bervariasi pada daerah Tembalang inilah, yang membuat daerah ini secara tidak langsung bukanlah kawasan miskin yang jelas-jelas memerlukan program sosial seperti MBG, tetapi juga bukan daerah di mana seluruh penduduknya hidup sejahtera sehingga program tersebut menjadi tidak relevan seutuhnya. Kecamatan Tembalang memiliki posisi yang lebih kompleks dalam konteks kemasyarakatan, di mana ada kelompok masyarakat yang tampak sejahtera dan ada pula yang masih berjuang menghadapi masalah ekonomi dalam kehidupan

sehari-hari. Perbedaan ini tidak selalu terlihat di permukaan, sering kali terhalang oleh citra Tembalang sebagai pusat pendidikan dan hunian kelas menengah. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat dari MBG, bagaimana penerimaan program itu, dan apa artinya bagi penduduk lokal khususnya walid murid yang ada di SD Tembalang tidak bisa dijawab dengan mudah dan bisa saja menjadi topik kompleks yang menarik untuk dibahas.

## **2.3 SD Negeri Tembalang sebagai Lokasi Penelitian**

### **2.3.1 Sejarah dan Profil Institusi**

SD Negeri Tembalang sebagai institusi pendidikan tingkat dasar bisa dibilang sudah berumur cukup tua. Sekolah ini sendiri didirikan pada 1 Januari 1910 berdasarkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Nomor 421.2/001/IV/92/85 yang terdapat pada website resmi sekolah ini. Yang menjadikan sekolah ini salah satu institusi pendidikan tertua di Kecamatan Tembalang. Berada di Jalan Jatimulyo Nomor 4, Tembalang, sekolah ini telah melewati berbagai tahap sejarah daerah, mulai dari masa ketika Tembalang masih tenang dan agraris, hingga terjadi perubahan sosial akibat pembangunan universitas, dan kini berdiri di tengah keramaian dengan banyak mahasiswa dan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat. Sekolah ini sendiri telah mendapatkan akreditasi A dan dikenal sebagai sekolah percontohan di Kecamatan Tembalang, yang merupakan pengakuan terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan (Arsip SDN Tembalang, 2024). SDN Tembalang merupakan salah satu institusi yang cukup sukses menggait peminat melalui kualitasnya, terbukti dari jumlah peserta didiknya yang mencapai 336 murid pada tahun 2026. Dan pastinya, banyaknya jumlah peserta didik ini diimbangi oleh jumlah tenaga didik yang sudah disesuaikan untuk mendukung keefektifan dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) dengan total jumlah 20 tenaga didik, SDN Tembalang siap menjadi wadah pendidikan dasar yang baik bagi para peserta didik selama enam tahun penuh (Kemendikdasmen, 2026)



**Gambar 2. Lokasi Penelitian**  
 Sumber: Peta citra google earth (open source)

Jika dilihat dari apa saja fasilitas yang di hadirkan untuk muridnya, SDN Tembalang memiliki fasilitas yang cukup lengkap, termasuk dua belas kelas, satu ruang untuk guru, satu ruang bagi kepala sekolah, perpustakaan, mushola, ruang UKS, rumah penjaga, dan kantin, semua berada dalam satu area sekolah. Dengan kapasitas dua kelompok belajar per tingkat, sekolah ini dianggap cukup besar untuk ukuran sekolah dasar negeri. Visi dari sekolah ini adalah menciptakan individu yang mandiri dan berprestasi, yang dilandasi iman dan takwa, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani, keterampilan, dan akhlak yang baik. Yang mencerminkan nilai-nilai yang menyeluruh, tidak hanya fokus pada prestasi akademik tetapi juga pada pembentukan karakter murid. Sekolah ini juga mengusung nama institusional BERSINAR, yang merupakan akronim dari Bersih, Sehat, Integritas, Nasionalis, dan Religi, yang bisa dibilang dijadikan “jargon” dasar dari sekolah ini sendiri.



**Gambar 3. SDN Tembalang**  
Sumber : Dokumentasi Peneliti

### **2.3.2 Profil Sosial-Ekonomi Siswa**

Dari hasil pengamatan awal di lapangan, berdasarkan interview dengan Informan, variasi profil sosial-ekonomi siswa di SDN Tembalang jauh lebih beragam dan bervariasi daripada yang bisa dibayangkan berdasarkan pandangan umum dari permukaan tentang wilayah tersebut. Mayoritas murid berasal dari keluarga dengan keadaan ekonomi yang bisa dibilang cukup stabil, seperti anak-anak dari orang tua dengan pekerjaan tetap seperti pegawai negeri sipil, guru, dosen, wirausahawan, atau pekerja swasta yang memiliki penghasilan tetap yang cukup baik. Anak-anak ini sudah memiliki pola hidup khususnya pola konsumsi yang cukup teratur, mereka terbiasa makan dengan teratur di rumah, sarapan sebelum pergi ke sekolah, dan tidak menghadapi masalah yang serius dalam hal kecukupan makanan sehari-hari. Untuk keluarga-keluarga ini, pastinya tidak akan menjadikan program MBG sebagai pegangan satu-satunya untuk makanan keluarga mereka.

Di sisi lain, ada beberapa siswa yang berasal dari keluarga dengan penghasilan yang tidak stabil. Orang tua mereka adalah orang yang berkerja sebagai pedagang kecil yang pendapatannya saja sangat dipengaruhi oleh keadaan pasar, pekerja bangunan yang tidak menjamin mendapat pekerjaan setiap hari, tukang ojek yang penghasilannya bergantung pada jumlah penumpang, atau tenaga kerja

informal lain yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan dan tidak stabil pastinya. Kondisi ketidakpastian pendapatan ini secara langsung bisa dibilang mempengaruhi pola konsumsi keluarga, termasuk kualitas dan jumlah makanan yang dikonsumsi anak-anak. Tentunya bagi kelompok ini, program bantuan dan manfaat program MBG terasa lebih nyata secara langsung (Mukhlis, 2025). Adanya dua latar belakang ekonomi yang berbeda dalam satu sekolah yang sama, yang menciptakan dinamika sosial yang cukup menarik. Mereka belajar di ruang yang sama, duduk di bangku yang sama, dan mendapatkan kotak makanan yang sama dari program yang sama pula. Akan tetapi, pengalaman menerima makanan tersebut bisa berbeda maknanya berdasarkan konteks keluarga masing-masing. Sekolah-sekolah yang siswanya berasal dari keluarga yang sudah lebih mapan secara ekonomi, MBG biasanya dianggap sebagai fasilitas yang berguna, tetapi urgensinya tidak terlalu tinggi dan bisa dibilang tidak menjadi kebutuhan yang mendesak. Sementara itu, di sekolah yang siswanya banyak berasal dari keluarga yang kurang mampu, program ini dilihat sebagai intervensi yang benar-benar mengubah keadaan. SDN Tembalang, dengan keragaman ekonomi di dalamnya, menjadi tempat di mana kedua pemahaman tersebut dapat hadir bersamaan. (Prepotif, 2026).

### 2.3.3 Profil Informan

| No | Nama (Samaran) | Usia     | Pekerjaan                  |
|----|----------------|----------|----------------------------|
| 1  | Bu Surti       | 41 tahun | Guru Sekolah Dasar         |
| 2  | Bu Nurdayati   | 44 tahun | Bisnis Kos-Kosam           |
| 3  | Pak Damora     | 45 tahun | Karyawan Swasta            |
| 4  | Pak Eko        | 47 tahun | PNS dan Supir Maxim        |
| 5  | Bu Siti        | 42 tahun | Ibu Rumah Tangga           |
| 6  | Bu Nancy       | 43 tahun | Karyawan Perusahaan Swasta |
| 7  | Pak Suryo      | 46 tahun | Karyawan Perusahaan Swasta |

**Tabel 1.1.** Profil Informan

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para wali murid di SDN Tembalang yang secara langsung bersinggungan dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara umum, profil informan merepresentasikan kelompok masyarakat modern dengan latar belakang pekerjaan, rutinitas, dan dinamika rumah tangga yang beragam. Pemilihan kelompok informan ini didasarkan pada peran sentral mereka sebagai pihak yang memantau, mendampingi, dan pada akhirnya merespons kebijakan yang diturunkan oleh negara kepada anak-anak mereka.

Karakteristik para wali murid ini sangat relevan dengan fokus penelitian mengenai pemaknaan program MBG. Para wali murid bukan entitas yang berperan sekadar sebagai penerima bantuan yang pasif, melainkan menjadi subjek aktif yang telah memiliki standar, kebiasaan, dan pemahaman tersendiri mengenai kelayakan, kebersihan, bahkan spesifik pemenuhan gizi keluarga di rumah sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Melalui keseharian dan sudut pandang para informan inilah, penelitian dapat melihat secara langsung bagaimana sebuah program berskala nasional bersentuhan dengan realitas keluarga. Posisi para wali murid ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana wacana dan intervensi dari negara diterima, disikapi, serta dimaknai di dalam masyarakat.

## **2.4 Keberjalanan Program MBG di SDN Tembalang**

### **2.4.1 Penggemukan Peran Guru**

Sebagai institusi pendidikan negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Semarang, SDN Tembalang dapat dibilang secara struktural merupakan bagian dari struktur pemerintahan dalam sektor pendidikan. Posisi ini membuatnya bisa dibilang relatif mudah diakses dan dilibatkan dalam keberjalanan kebijakan publik yang berasal dari pemerintah pusat. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan ketentuan, berkoordinasi dengan SPPG, memantau distribusi di sekolah, melaporkan masalah yang timbul, dan menyampaikan masukan dari guru serta orang tua kepada pihak yang bersangkutan. Para guru kelas juga terlibat dalam

proses distribusi dan pengawasan konsumsi siswa, sedangkan staf administrasi bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan komunikasi terkait program.



**Gambar 4.** *Pembagian MBG di SDN Tembalang*  
Sumber: Dokumentasi Informan

Administratif tentu saja bukan menjadi peran satu-satunya SDN Tembalang, peran sekolah bahkan meluas cukup signifikan. Para guru, yang tugas utama mereka sebenarnya adalah mengajar para murid, juga berperan dan ikut andil sebagai penghubung dalam penerapan kebijakan pangan negara di tingkat sekolah ini. Perannya sendiri kurang lebih berfokus dalam mengatur distribusi makanan, memantau kondisi anak-anak saat makan, serta menampung keluhan atau masukan dari siswa mengenai menu yang disajikan. Tentu saja suksesnya pelaksanaan MBG di sekolah dasar sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi antara pihak sekolah dengan penyedia makanan. Jika koordinasinya terjalin dengan baik, makanan dapat dibagikan dengan lancar dan tepat waktu. Namun, apabila koordinasi mengalami kendala, tentunya siswa akan merasakan dampak langsung dengan harus menunggu makanan di kelas dan berpengaruh juga dalam kualitas program ini sendiri (Raihan et al., 2026).



**Gambar 5.** *Guru Menghitung Jumlah MBG*  
Sumber: Dokumentasi Informan

Lebih dalam lagi, sebenarnya perluasan peran ini kadang tidak mudah ditangani oleh seluruh guru. Keterlibatan guru dalam distribusi program pangan membawa tantangan tersendiri, terutama dalam membagi energi dan fokus antara tugas mengajar dan tugas administratif distribusi. Para guru yang sebelumnya hanya berfokus dan berfokus pada proses pembelajaran kini juga harus memastikan bahwa makanan didistribusikan dengan benar, serta menangani situasi ketika terjadi masalah dalam pengiriman. Tambahan beban ini, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi mengganggu kualitas pengajaran yang seharusnya menjadi fokus utama mereka (Gurning et al., 2023).

Saat makan siang yang hanya mengambil waktu beberapa menit di sekolah ini, sebenarnya dan tentunya memiliki aspek yang lebih luas. Bagi sedikit anak, ini mungkin adalah pertama kalinya mereka menikmati nasi dengan variasi lauk yang berbeda dibandingkan dengan yang biasa mereka dapatkan di rumah. Sementara itu, bagi sebagian lainnya, pengalaman ini mungkin terasa biasa karena makanan yang disediakan di sekolah tidak jauh berbeda dari makanan sehari-hari yang mereka konsumsi di rumah. Keragaman pengalaman yang terjadi secara implisit di

dalam satu ruang kelas inilah yang menjadi salah satu fenomena menarik untuk dikaji lebih dalam dan lebih intim nantinya



**Gambar 6.** Struktur Kepengurusan MBG di SDN Tembalang  
Sumber : Dokumentasi Informan

#### 2.4.2 Koordinasi *Feedback* Program MBG

Program makan bergizi gratis atau biasa yang dikenal dengan MBG, implementasinya di SDN Tembalang pastinya tidak terjadi tanpa adanya komunikasi dua arah yang aktif antara kedua belah pihak, yaitu pihak sekolah dan pihak SPPG. Terdapat jaringan informasi yang bergerak dan membawa informasi ke berbagai arah secara bersamaan, informasi dari SPPG ke sekolah melalui konfirmasi terkait menu dan jadwal pengiriman, dari siswa ke SPPG melalui mekanisme umpan balik, serta dari orang tua ke sekolah melalui masukan dan pertanyaan yang disampaikan dalam bermacam forum komunikasi baik formal ataupun informal.

Mekanisme umpan balik yang paling menarik yang terjadi dalam program MBG justru muncul dari hal-hal kecil yang bisa dibilang menarik dan unik. Ini dimulai dari murid yang menyisipkan pesan tertulis di wadah makan (ompreng) kosong yang nantinya akan dikembalikan ke SPPG. Isi pesan tersebut biasanya bisa berupa komentar mengenai rasa, permintaan menu tertentu, atau sekedar ucapan

terima kasih. Pihak SPPG biasanya akan mengumpulkan pesan-pesan tersebut dan dijadikan untuk evaluasi. Meskipun tampak sepele, mekanisme sederhana ini menyimpan makna yang menarik karena kesannya seperti memberdayakan suara anak-anak sebagai individu yang memiliki suara. Melihat dari perspektif pengelolaan, bentuk partisipasi penerima manfaat yang paling dasar seperti ini justru pantas mendapatkan perhatian yang lebih dan patut di apresiasi.

Program yang melibatkan banyak pihak seperti MBG pasti alur komunikasinya tidak hanya seputar komunikasi formal saja, terdapat juga arus informasi informal yang juga krusial dalam mengelola program ini pastinya. Mulai dari orang tua yang mendengar cerita anaknya mengenai menu yang mereka dapat hari itu, guru yang berdiskusi secara pribadi tentang kualitas makanan yang dianggap kurang baik pada hari tertentu, atau bahkan anak-anak yang menyelipkan pesan tertulis melalui kotak ompreng yang mereka dapat, semuanya merupakan bagian dari ekosistem komunikasi yang berpengaruh pada perkembangan dan penyesuaian program ini. Jurnal Penelitian Ilmiah (Kristani, 2025) mencoba menjelaskan dan menekankan yang mana seharusnya, kepala sekolah, guru, dan siswa memiliki peran aktif yang saling mendukung, dan komunikasi yang berjalan dengan baik adalah syarat utama agar semua peran tersebut dapat berfungsi secara efektif, dalam kepengurusan program ini, agar implementasinya bisa baik

## **2.5 Dapur Sehat Tembalang sebagai Infrastruktur Program Negara**

### **2.5.1 SPPG Sebagai Unit Produksi**

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Sehat Tembalang dapat kita lihat sebagai contoh kehadiran pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah ini. Bagaimana kebijakan yang sebelumnya hanya tertulis di Peraturan Presiden menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh para siswa dan masyarakat pastinya secara luas. Mereka mendapatkan nasi, lauk, sayuran, buah, dan beberapa hal lainnya yang semuanya disajikan dalam kotak makan yang biasa di sebut ompreng. Jika kita lihat secara fungsi dapur ini jelas berbeda dengan kantin biasa yang berorientasi pada profit. SPPG beroperasi berdasarkan aturan program, bukan berdasarkan logika pasar sederhana pedagang, setidaknya itu yang tertulis di dalam rencana dan rancangannya. Terdapat kuota

penerima yang harus dipenuhi, menu yang dibuat oleh ahli gizi sesuai dengan standar pemerintah, jadwal distribusi yang telah ditetapkan dan tidak boleh di lewatkan sedikitpun, dan anggaran yang bersumber dari APBN yang mana di kelola oleh instansi negara yang besar lainnya, yang mana hal ini membuat setiap porsi makanan yang dihasilkan dari dapur ini bukan makanan gratis secara teknis, melainkan bagian dari penggunaan anggaran negara yang perlu diawasi, diaudit, dan dipertanggungjawabkan (Badan Gizi Nasional, 2025).



**Gambar 7. Struktur organisasi SPPG Dapur Sehat**  
Sumber: Arsip Informan

SPPG Dapur Sehat Tembalang sendiri memiliki sturktur organisasinya dalam pelaksanaannya, yang mana ini mencerminkan tingkat kompleksitas operasional yang diperlukan untuk menjalankan program berskala besar ini. Di SPPG Dapur Sehat Tembalang sendiri dipimpin oleh seorang kepala dapur yang mana juga didampingi oleh seorang ahli gizi yang bertanggung jawab atas standar nutrisi pada menu, dan juga di sisi lainnya ada staf administrasi yang menangani keuangan dan pelaporan. Di bawah kepemimpinan mereka secara teknis dan tim, terdapat sekitar hampir lima puluh karyawan yang terorganisasi dalam beberapa divisi operasional. Terdapat tim gudang yang bertugas menerima dan menyimpan bahan baku, tim persiapan yang terdiri dari tujuh orang yang memiliki tugas melakukan preparasi bahan sebelum akhirnya di eksekusi, seperti memotong,

memilah, dan proses persiapan lainnya yang mana nantinya akan diserahkan kepada tim pengolahan, untuk tim pengolahan, dengan anggota tujuh orang, bertugas untuk mengeksekusi bahan yang sudah disiapkan dan menjadikannya lauk dan hidangan lainnya. Selanjutnya, ada tim pemorsian yang beranggotakan sepuluh orang yang bertugas mengemas makanan sesuai dengan standar berat per jenjang pendidikan yang sesuai gramasinya. Selanjutnya, makanan yang sudah disesuaikan porsiya diserahkan kepada tim distribusi yang beranggotakan empat orang yang pada akhirnya mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Pada akhirnya, setelah kotak ompreng dikembalikan, ada tim pencucian wadah yang terdiri dari 13 orang yang bertanggung jawab atas kebersihan dan sterilisasi wadah makan. Dengan ini bisa dilihat bagaimana pembagian tugas yang rinci ini menunjukkan bahwa penyediaan makanan dalam skala program sosial adalah pekerjaan yang kompleks, tidak hanya sekedar aktivitas memasak biasa dan konvensional.



**Gambar 8.** SPPG Dapur Sehat Tembalang  
Sumber: Dokumentasi Informan

Secara simbolis, dapur ini dapat dipahami sebagai tempat transformasi ,dalam pengertian jika dilihat dari fungsinya yang lebih dalam. Di sini, bahan-bahan mentah yang diperoleh dari pedagang pasar lokal dijadikan makanan, dikemas, dan kemudian menjadi 'pemberian dari pemerintah'. Proses produksi yang berlangsung

jauh dari pandangan siswa ini justru memperkuat narasi bahwa makanan itu berasal dari 'atas', yang mana ini dikuatkan oleh informan yang menyebut program ini dianggap oleh anak-anak sebagai program pemberian 'pusat'. Bagi anak-anak sekolah yang tidak mengetahui proses di balik kotak makan yang mereka terima, makanan itu menjadi simbol yang lebih berarti daripada kata-kata. Dan dalam konteks program sosial yang didukung negara sendiri, makanan memang selalu memiliki makna simbolik tentang kepedulian, tanggung jawab, dan hubungan kekuasaan antara pemberi dan penerima (Cupertino, 2022). Melalui dapur ini juga pada akhirnya program MBG sendiri bisa eksis di tengah masyarakat secara langsung, yang membuat masyarakat dapat melihat dan menilai program ini secara langsung pula secara efektif.

### **2.5.2 Proses Produksi MBG**

Bagaimana makanan sampai ke tangan siswa dalam keadaan yang masih baik dan segar, untuk itu kita perlu menyelidiki secara holistik proses yang berlangsung jauh sebelum kegiatan sekolah dimulai. Aktivitas di Dapur Sehat Tembalang yang dimulai sejak tengah malam. Dimulai dari tim logistik gudang yang mendistribusikan kepada Tim pemorsian untuk disiapkan agar lebih muda di olah oleh tim pengolahan, yang mana mulai memasak lauk pada jam-jam tengah malam karena proses memasak daging dan sumber protein hewani memerlukan waktu yang lebih lama agar mencapai kematangan optimal sekaligus memastikan keamanan pangan, dikarenakan sayuran, yang lebih rentan, yang lebih cepat kehilangan kesegaran serta kandungan gizi jika dimasak terlalu lama sebelum disajikan, baru diolah menjelang pagi. Strategi penjadwalan ini dibuat untuk memastikan bahwa saat makanan tiba di sekolah pada pagi hari, semua komponen masih dalam kondisi yang sebaik mungkin, sehingga tidak berpengaruh pada kondisi gizinya.



**Gambar 9.** *Divisi Pemorsian Dalam Proses Produksi*

Sumber : Dokumentasi Informan

Setelah tahap memasak selesai, tugas beralih ke tim pemorsian. Tim ini menimbang setiap porsi sesuai dengan standar gramasi yang berbeda untuk tiap jenjang pendidikan, di mana anak PAUD menerima porsi lebih sedikit dibandingkan siswa SD, dan siswa SD mendapatkan porsi yang berbeda lagi dari siswa SMP dan begitu pula seterusnya. Standar ini ditentukan berdasarkan kebutuhan kalori dan nutrisi yang bervariasi di setiap tahap perkembangan. Setelah diporsikan, makanan dikemas dalam wadah yang biasanya di sebut sebagai ompreng, yang kemudian disegel untuk menjaga kebersihan selama proses distribusi. Yang mana proses distribusi makanan untuk siswa SD dilakukan pada gelombang pertama di pagi hari, sedangkan gelombang kedua untuk jenjang yang berbeda akan menyusul beberapa jam setelahnya. Proses distribusi ini biasanya dilakukan menggunakan mobil ataupun kendaraan yang pastinya sudah mengikuti standar dari pemerintah sebelumnya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kualitas dari makanan yang akan dibagikan dengan menjadikan efektifitas dan keamanan dalam distribusi sebagai prioritas



**Gambar 10.** *Transportasi Divisi Distribusi SPPG Dapur Sehat*  
Sumber : Dokumentasi Peneliti

### **2.5.3 Rantai Pasok Pangan dan Dampak Ekonomi Lokal**

Salah satu hal yang sering terabaikan mengenai keberadaan SPPG yang sebenarnya menarik untuk diperhatikan adalah pengaruhnya terhadap ekosistem ekonomi pangan di daerah lokal. Untuk memproduksi ribuan porsi makanan setiap harinya, dapur ini memerlukan pasokan bahan baku yang melimpah dan teratur, termasuk beras, berbagai jenis atau varietas sayuran, sumber protein hewani seperti ayam dan ikan, telur, tahu, tempe, bumbu, dan berbagai bahan tambahan lainnya untuk membuat beberapa porsi MBG. Semua bahan tersebut diperoleh dari pemasok lokal yang bekerja sama dengan SPPG berdasarkan kontrak dan jadwal pengiriman yang tetap yang biasanya disebut *vendour*. Dengan kata lain, SPPG berperan sebagai pembeli utama yang konsisten bagi para pedagang dan petani lokal, yang pada gilirannya memicu aktivitas ekonomi yang lebih luas daripada yang terlihat sekilas jika dilihat dari permukaan.

Di samping itu, SPPG juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi sejumlah orang dari komunitas setempat. Lima puluh pekerja yang tergabung dalam berbagai

divisi operasional dapur ini merupakan penduduk lokal dari Tembalang dan sekitarnya. Menariknya, komposisi tenaga kerja ini mencakup banyak ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pasar kerja formal akibat keterbatasan pendidikan atau tanggung jawab untuk mengurus keluarga yang menghalangi mobilitas mereka. Program MBG, melalui SPPG, secara tidak langsung memberikan kesempatan ekonomi bagi kelompok tersebut. Yang mana, hal serupa juga di sampaikan oleh Kementerian Keuangan RI (2025) yang mana bahwa pengembangan UMKM dan tenaga kerja lokal merupakan salah satu target utama dari perancangan program MBG, dan keberadaan SPPG Dapur Sehat Tembalang merupakan manifestasi nyata dari tujuan tersebut.

Melihat program yang secara administratif bisa dibilang ‘cukup baik’ ini, sebenarnya cukup baik jika dilihat melalui satu perspektif saja, khususnya perspektif kebijakan yang cenderung kaku. Program dengan perencanaan yang ‘terlihat baik’ ini sebenarnya dapat menimbulkan pertanyaan: apakah program ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, apakah program ini dapat diterima dengan baik, dan apakah program ini benar-benar dapat ‘membantu’ dengan baik? Oleh karena itu, pada bab berikutnya kita akan melihat bagaimana proses penerimaan, dan pemaknaan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada studi kasus ini, merupakan wali murid SDN Tembalang